



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/36 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Program pembentukan Perda disusun oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa penyusunan dan penetapan Program Pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati Kebumen untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 21 November 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,





Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Kebumen
Nomor : 170/36 TAHUN 2025
Tanggal : 21 November 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026**

No	Tentang	Maksud dan Tujuan	Pelaksanaan	Status		Disertai		Unit/ Instansi Terkait	Pem- bahasan
				Baru	Ubah	NA	Keterangan /Penjelasan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengembangan Kawasan Taman Bumi [Geopark] Kebumen	Penyesuaian dengan telah ditetapkan Geopark Kebumen sebagai Unesco Global Geopark dengan memperhatikan Perpres Nomor 9 Tahun 2019 dan mencabut Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Geopark Karangsambung Karangbolong.	Atribusi	√		√		BAPPE RIDA	MS II TAHUN 2025/ 2026
2.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perseroda Luk Ulo Farma	Disusun dalam rangka Perubahan Modal Dasar pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Luk Ulo Farma dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.	Delegasi		√		√	Bagian Perekonomian dan SDA	MS II TAHUN 2025/ 2026
3.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Aneka Usaha Kebumen Jaya	Disusun dalam rangka Perubahan Modal Dasar pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha	Delegasi		√		√	Bagian Perekonomian dan SDA	MS II TAHUN 2025/ 2026



		Kebumen Jaya dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.							
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kebumen	Melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan penyesuaian terhadap jumlah dan jangka waktu penyertaan modal pada BUMD, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 jangka waktu sampai dengan tahun 2025.	Delegasi	√		√		Bagian Perekonomian dan SDA	MS II TAHUN 2025/2026
5.	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Disusun sebagai tindak lanjut Pasal 8 Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak.		√		√		DINSOS P3A	MS III TAHUN 2025/2026
6.	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2024 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.	INISIATIF DPRD	√		√		KOMISI D	MS III TAHUN 2025/2026
7.	Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos,	INISIATIF DPRD	√		√		KOMISI D	MS III TAHUN 2025/2026



		Telekomunikasi, dan Penyiaran. Penyesuaian terhadap kebutuhan penataan kabel telekomunikasi dalam menunjang estetika di kabupaten Kebumen.							
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Melaksanakan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /III
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /III
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Disusun sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.	Kumulatif Terbuka	√		√		BPKPD	KUMU-LATIF /I
11.	Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Disusun sebagai pedoman dalam pelindungan pekerja migran di Kabupaten Kebumen, menyempurnakan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia/ Tenaga Kerja Indonesia.	INISIATIF DPRD	√		√		KOMISI A	MS I TAHUN 2026/ 2027
12.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah	Raperda disusun sebagai respon terhadap meningkatnya kompleksitas permasalahan persampahan di daerah, baik dari	INISIATIF DPRD		√		√	BAPEM PERDA	MS I TAHUN 2026/ 2027



		sisi volume timbulan, jenis sampah, maupun kapasitas kelembagaan pengelolanya. Regulasi sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan implementasi di lapangan, terutama dalam hal koordinasi lintas sektor, optimalisasi lembaga pengelola yang telah ada, serta partisipasi masyarakat.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SAMAN